

BERKIPRAH MEMBENTUK KABUPATEN NEPO BERALASAN SEJARAH DAN REKONDISI POLITIK DI KABUPATEN BARRU

(Studi Sejarah, Etnologi dan Antropologi)

Oleh:

**Andi M. Anwar Zaenong
(IAIN Pare-Pare)**

ABSTRAKSI

Kabupaten Barru secara tradisional tergambar sebagai daerah kesatuan, berkata; "*Datu ri Tanete, Petta ri Berru sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja*"¹ Keempatnya tergabung sebagai sistem konfederasi atau *pasiajijeng*, sehingga dengan perbedaannya itu merupakan suatu alasan yang berpotensi di setiap wilayah untuk meminta pemekaran. Dengan demikian, formasi Kabupaten Nepo di wilayah Bagian Utara, secara alternatif beralasan sekali terbentuk menurut perspektif sejarah, etnologi, sosiologi dan antropologi; meliputi 4 wilayah Kecamatan; Mallusetasi, Soppeng Riaja, Balusu, dan Bojo (Kec. Persiapan). Keempatnya diklen berasal dari satu leluhur bernama *Messang*, dan tidak satupun di antaranya dalam sistem politik tradisional sebagai Kerajaan Induk, kecuali wilayah berkedudukan sebagai *Lili'* bahasa Bugis, artinya daerah provinsi atau bawahan. Semuanya merupakan negeri-negeri protektorat di bawah naungan antara dua kerajaan senior; Soppeng dan Suppa; dan bukan kiranya bernaung di bawah Kerajaan selainya di wilayah se Kabupaten; Tanete dan Barru.

Kata Kunci: Konsepsi Pemekaran Barru dengan Pembentukan Kabupaten Nepo.

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Barru berada di antara Dua Kota; Makassar dan Pare-pare dengan memanjang jarak sekitar 80 km, kepanjangannya dua kali lipat dari pada Dua Kabupaten; Pangkep dan Maros. Penduduknya dihuni Suku Bugis dengan tiga sub etnis besar; *To Tanete*, *To Berru*, dan *To Nepo*.

¹ Artinya : *Datu prestise Raja di Tanete, Petta prestise Raja di Barru dan Mallusetasi, dan Arung prestise Raja di Soppeng Riaja*

Dari ketiga etnis tersebut, masyarakatnya terbentuk dengan dua sistem politik tradisional dikenal dengan sistem masyarakat Tunggal dan masyarakat Bertingkat;² sehingga dari keduanya bukan kebetulan masyarakat Kabupaten Barru kelihatan ada perbedaan mendasar mengenai politik tradisional, di antaranya terdiri atas Kerajaan Otonom seperti Tanete dan Barru,³ dan selainnya merupakan Kerajaan-Kerajaan *Lili* (Daerah) seperti Nepo, Balusu dan Kiru-Kiru;⁴ yakni ketiganya merupakan wilayah provinsi dari Dua Kerajaan Induk; yaitu, Soppeng salah satu anggota konfederasi *TellumpoccoE*, dan Suppa' sebagai kerajaan senior, pemimpin dan sekaligus anggota konfederasi tradisional *Ajangtapareng* terdiri atas Suppa sendiri, Sidenreng, Sawitto, Rappang, dan Alitta.

Berangkat dari gambaran di atas, antara lain dijadikan alasan mengapa Kabupaten Barru berpotensi dimekarkan, baik karena pertimbangan sistem masyarakatnya berbeda, maupun karena pertimbangan sejarah dan etnologinya adalah memiliki perbedaan secara signifikan. Persoalan dalam perspektif sejarah dan antropologi politiknya, dinilai tidak bermasalah bersama dengan potensi sumber daya manusia dan daya dukungan alamnya; kecuali tersisa dipermasalahakan mengenai jumlah penduduknya belum menunjang dengan aturan mainnya.

Oleh sebab itu, untuk berkiprah lebih cepat dan lebih baik dengan pemikiran ini, adalah bukan suatu kemustahilan yang mengambang di depan mata, disebabkan konsepsinya sendiri sebagai negeri konfederasi secara fakta memberi masukan tersendiri dengan adanya pemikiran ke sana untuk berkembang; selain kemajuan masyarakat dan komunitas berbasis sub etnis *To Nepo* di Kabupaten Barru

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1983), Cet. II. h. 95.

³ Hasan Walinono, *Tanete Tinjauan Sosiologi*, Disertasi. Univ. Hasanuddin

⁴ Andi M, Anwar Zaenong, *Sistem Politik Tradisional di Soppeng Rajaan Bekas Kerajaan Lili Kiru-Kiru dan Balusu*, Tesis, UNHAS, 2009, h. 100-14

Bagian Utara, juga tidak kurang pentingnya merupakan suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan.

Dalam sistem masyarakat tradisional sebagai di atas, keduanya dapat terlihat di Kabupaten Barru dengan sistem masyarakat Tunggal sebagaimana sistem Negara *Commonwelt* dahulu di bagian utara, seperti Nepo, Kiru-Kiru dan Balusu, yakni dengan masyarakatnya secara tradisional berangkat dengan sistem tidak mengenal adanya atasan kecuali mereka berada dalam posisi sederajat; atau dari padanya menunjukkan adanya kesetaraan berpolitik yang dimobilisasi Para Pembesar sebagai senator digelar *To Battoa*, *To Maraja* atau *To Malampa* bahasa Bugis, dan mereka diberi kekuasaan memimpin sebagai golongan *Pakkatenni Ade*⁵; yakni suatu sistem kelembagaan politik dalam masyarakat tradisional di Kerajaan Nepo bergelar *Ade' PatapuloE*. Mereka merupakan komunitas pemilik negeri disebut *Wija To Pabbanua Punnana Tana*.

Tentunya, mereka tanpa kecuali merupakan keluarga orang-orang Sebagai atau Pembesar yang ber-wibawa pada setiap kampung, dan juga mereka digelar *Sijajinnai Tana'E / Lino'E* atau istilah *Wija Tellengkang* dalam bahasa Bugis artinya golongan pribumi / paku alam atau penduduk asli-*toto*/tulen dan mereka bukan dikenal orang-orang lain disebut *bule'*.

Mereka merupakan masyarakat Tunggal berasal dari leluhur satu-satunya dikenal secara mistik bernama *Messang*; dan seperti ini tidak berbeda halnya dengan leluhur satu-satunya bagi masyarakat *To Tanete* sebagai juga manusia dikenal secara mistik *To Tompo'* bernama *La Sangiang* atau *To Sangiang*. Istilah *To Tompo* dalam bahasa Bugis, antara lain berarti Manusia Pribumi yang menunjukkan Penduduk Asli/*toto*; dan berbeda maksudnya dengan istilah *To Manurung* dalam bahasa Bugis berarti golongan

⁵ *Ibid.*

Manusia Langit/orang di atas, dan dengan keturunannya bersilzilah sebagai golongan bangsawan berdarah dewa atau biru.

Dalam Islam mengenai istilah *To Manurung* tidak dikenal secara formal atau tekstual, kecuali secara takwilan dapat dikenal berdasarkan simbol yang menggunakan nama Nabi Adam a.s. Yakni sebagai manusia pertama diturunkan langsung dari syurga ke permukaan bumi yang berfungsi sebagai khalifah Allah swt.⁶ Sesungguhnya makna mengenai riwayat Adam a.s. tersebut adalah di dalam budaya tidak berbeda maksudnya dengan mitos istilah *Pua Nene*⁷ disebut *To Manurung* atau *Manurung'E*, yakni suatu simbol yang dipercaya menegakkan sistem politik tradisional di Sulawesi-Selatan.

Oleh sebab itu, di Kabupaten Barru dalam gambaran di atas, tentunya menyampaikan gelaran mitos terhadap dua leluhur berbeda, sehingga antara satu dan lainnya, yakni Nepo dan Tanete, secara berdua merupakan wilayah leluhur yang berpotensi memisahkan diri; yakni selain disebabkan berbeda secara etnologi, juga perbedaan lainnya dalam sosiologi, sejarah dan antropologi.

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka untuk beranjak dari pokok permasalahan di atas terlebih dahulu dikemukakan pertanyaan sepanjang berhubungan dengan potensi pemekaran di Kabupaten Barru, yakni bagaimana potensi pemekaran di Kabupaten Barru, yakni apa dan bagaimana pembentukan Kabupaten Nepo ?

B. Landasan Historis Kabupaten Barru Sebagai Suatu Negeri Konfederasi

Dalam sejarah tradisional mengenai Kabupaten Barru belum dikenal dengan keadaan formalnya sebagai sekarang ini, kecuali hanya dikenal pada awalnya sebuah Kerajaan Otonom yang berdampingan dengan kerajaan di sekitarnya; Tanete, Balusu, Soppeng dan Bone. Dan kehadirannya sebelum berkiprah

⁶ Baca Q.S. : 2 : 30

⁷ *Pua Nene* bahasa Bugis artinya cerita nenek moyang yang sama maksudnya dengan istilah *israilyat* dalam bahasa Alquran

men-dahului kemerdekaan RI 1945, juga tidak dikenal banyak kecuali dengan sistem politik berdasarkan peninggalan Belanda disebut *Onderafdeling* berkedudukan di Sumpang MinangaE.

Itulah dalam kebijakannya memimpin beberapa wilayah terlihat sebagai sebuah konfederasi atau *passiajingeng* dalam bahasa Bugis, artinya sepanjang di sana adalah tidak berkuasa di wilayah-wilayah kecuali dengan sistem kesatuan terdiri atas beberapa kerajaan tradisional yang beranekaragam; Tanete, Barru, dan selainnya (Balusu, Kiru-kiru, Ajakkang, Siddo, Laboso/Mangkoso, Batupute dan Ceppaga). Di antaranya terbentuk sebagai suatu sistem konfederasi yang lebih kerdil bergelar Swapraja / Distrik Soppeng Riaja, dan selainnya tersisa sebagai wilayah bekas Kerajaan Nepo, Palanro, Bacukiki, Bojo' dan Soreang, kesemuanya ini dimasukkan ke dalam konfederasi satu wilayah pemerintahan kolonial di bagian utara disebut Swapraja / Distrik Mallusetasi sebagai bekas salah satu *Onderafdeling* di Pare-pare.

Dengan demikian, jika seluk beluk Kabupaten Barru ditelusuri secara cermat, maka di sini kelihatannya salah satu kabupaten/daerah di Sulawesi-Selatan memiliki keajaiban sejarah, disebabkan dari sedianya sebagai kerajaan kecil lagi tidak berpengaruh, tetapi dengan penjajahan Belanda sejak 1908 di Sulawesi-Selatan,⁸ kiprahnya berkembang pesat serta visi-misi dan statusnya meningkat terus selama dalam Pemerintahan Republik dibanding dengan Tanete, Suppa dan selainnya. Sehingga bekas Kerajaan Barru dalam sejarah termasuk berbagi untung dengan penjajahan, karena pemerintah daerah tetap saja berpegangan dengan sistem peninggalan kolonialisme.

⁸ Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Antropologi Politik Orang Bugis*, (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 463-7.

Sehubungan dengan pokok pembicaraan di atas, di Kabupaten Barru berdasarkan wilayah konfederasinya terdiri atas 4 Swapraja, dan itulah digambarkan berdasarkan multi kerajaan terpadu berkata; *"Datu ri Tanete, Petta ri Berru dan Mallusetasi, dan Arung ri Soppeng Riaja "*.⁹

Dengan demikian, berdasarkan salah satu fenomenanya, adalah terdapat sebuah tugu berdiri dengan indah di persimpangan empat Kota Barru, di atasnya terpajang dengan 4 (empat) pucuk payung kerajaan secara tertutup, sehingga dari padanya Kabupaten Barru menarik dibanggakan dengan keagungan simbol budaya yang mengalahkan daerah lainnya di Sulawesi-Selatan, dan mengapa di Barru tidak dibanggakan dengan kekayaan alamnya yang berfatamorgana dengan persawahan, pegunungan, kehariaan dan indus-trialisasi; seperti halnya, Sidrap, Pinrang, Pangkep, Maros dan sebagainya.

C. Argumentasi Sejarah, Etnologi, dan Anropologi Politik Dalam Pembentukan Kabupaten Nepo

Seperti dikenal sebelumnya, bahwa masyarakat tradisional di sepanjang Kabupaten Barru terbentuk dengan sistem masyarakat Tunggal dan Bertingkat; sehingga dari perbedaan itulah yang menyampaikan bahwa terdapat potensi kelayakan bagi setiap wilayah untuk semuanya dapat diajak berkonfederasi; namun dibalik itu, adalah tidak mustahil dalam setali dua uang dirindukan pula, bahwa kapankah saatnya di wilayah tertentu akan kembali dimekarkan atau memisahkan diri.

Setelah dirasakan sejarah telah menunjukkan perkembangan lebih jauh, seperti dengan kemajuan perkembangan budaya berdasarkan kualitas sumber daya dari diri masing-masing wilayah; sehingga di wilayah manapun secara sosiologis telah dipersatukan, dan kondisi telah menunjukkan jarum sebaliknya; tentu saja semangat di wilayah tersebut sudah tidak lagi terbandung, kapan kala di wilayah telah berkehendak untuk kembali berputar kepada asal-muasalnya; bukankah antara bersatu dan berpisah

⁹ Artinya : *Datu prestise Raja di Tanete, Petta prestise Raja di Barru dan Mallusetasi, dan Arung prestise Raja di Soppeng Riaja.*

merupakan dua kebiasaan hidup silih berganti. Dalam Alquran berkata, bahwa perputaran siang dan malam merupakan peredaran sejarah yang silih berganti di antara manusia.¹⁰

Demikian terjadi dalam kenyataan sosial umumnya, yakni semuanya itu merupakan kebiasaan manusia yang bergejala di mana-mana; dan itu merupakan prinsip dan aksioma yang sukar dibantah dalam hidup dan kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial, antara kesatuan dan pemisahan, antara konflik dan konsensus adalah keduanya bukan hal bersifat abadi, tetap yang abadi adalah perubahan. Oleh sebab itu, kapan kala kesatuan sudah tidak lebih baik, maka kesatuan itu sulit dipertahankan, dan atau kapan hidup berpisah menunjukkan telah lebih baik dan efektif, maka saja sistem persatuan dan kesatuan bakal terancam eksistensinya.

Itulah di Kabupaten Barru sepanjang berkonfederasi, adalah memang permulaannya beralasan sekali, karena perbedaan berbagai wilayah saat itu belum terjangkau kesanggupan secara otonom untuk berdiri sendiri, kecuali lebih baik dengan sistem dipersatukan; sehingga secara otonom di setiap wilayah bakal tidak efisien kecuali dengan sistem konfederasi atau *Passiajingeng*. Namun, dibalik itu setelah pembangunan berkembang terus dan lebih maju, dan bersama dengan sejarah telah menunjukkan jarum perubahan dan kemajuan, maka persepsi mengenai pemekaran daerah, misalnya di Kabupaten Barru sesungguhnya bukan suatu kemustahilan, setelah dalam masyarakat memilih berkiprah; bahwa untuk membangun masa depan yang lebih baik, diperlukan belajar dan kembali kepada sejarah. Bukankah sebelumnya sebagaimana di daerah lain telah berkontribusi memberikan indikator kemajuan berdasarkan hasil-hasil pemekaran; misalnya, desa, kecamatan dan kabupaten.

Sub etnis *To Nepa*, tentunya berbeda dengan sub etnis lainnya *To Berru* dan *To Tanete*; di Kecamatan Mallusetasi bekas Kerajaan Nepo sebelum penjajahan asing sebagai diliput secara etnologi,

¹⁰ Baca Q.S. : 2: 140

terlebih dahulu dipimpin pembesarnya sendiri berasal dari satu asal usul; yakni mereka secara sesama di Kerajaan Nepo berasal usul dari seseorang moyang bernama / *Messang*. Yakni nama seseorang yang dipercaya sebagai leluhur di beberapa wilayah; tidak saja mitosnya dikenal secara tradisional di Kerajaan Nepo dan sekitarnya, juga di Balusu dan Kiru-Kiru Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Kata / *Messang* dalam bahasa Bugis adalah dipastikan nama seseorang perempuan, karena dimulainya dengan hurup /, berbeda dengan kata *La* atau *To* sebagai hurup permulaan nama bagi laki-laki seperti *La Sangiang* / *To Sangiang*. Dari kedua nama tersebut bukan kebetulan antara / *Messang* dan *To/La Sangiang* dalam bahasa Bugis, merupakan dua kata bermakna setara atau merupakan kata sinonim yang berhubungan makna, dan dari kebanyakan artinya disamakan dengan kata *Yamaneng-mua*, *Ya-messang* dan *Sanging-iya* dalam bahasa Bugis, berarti kesemuanya adalah sama dan sederajat, dan dibalik itu juga tidak luput dengan adanya perbedaan.

Antara lain dari keduanya berbeda anggapan tradisional, yaitu di Tanete ketika *To/La Sangiang* yang memerintah sekian lama tidak berhasil membawa negerinya dengan aman, sejahtera, adil dan makmur, disebabkan seringkali dihadap dengan bencana dan kekacauan sosial secara berkepanjangan, sehingga dalam pemerintahannya hanya menjauhkan masyarakatnya dari kenyamanan dan keamanan. Sejak disinilah perspektif politik *To Sangiang* berhenti di negerinya sendiri dan mereka telah siap diperintah / *Makkasi-wiyang* atau *Manggade'* bahasa Bugis, setelah dengan sukarela menawarkan diri dipimpin oleh *Datu GollaE* di Segeri sebagai Raja Perdana Kerajaan Tanete, dan menyusul sesudahnya Raja-Raja secara turun-temurun. Itulah semuanya secara tradisional dilantik dengan sistem Putra Mahkota hingga kepada Raja terakhir *La Patau Raja Tanete XIII*.

Tentu saja, selama sistem bertahta tidak lagi menggunakan struktural Pangerang/Putra Mahkota yang menunjukkan keturunan ahliwaris, maka istilah *Datu* tradisional telah tertutup dalam sejarah Kerajaan Tanete. Meskipun sebagian keturunan ahliwaris sesudahnya, di antaranya tetap berserakan

memimpin wilayah, di samping mereka dikenal pemangku jabatan tradisional. Misalnya terhadap jabatan di atas wilayah pedalaman *To Sangiang*, sebelum semuanya secara *de facto* dijangkau kekuasaan Belanda 1855 di Tanete, antara lain sebagai pemangkuan tradisional oleh keturunan salah seorang ahliwaris Lapatau bergelar *Arung Tompa Bulu' Matajang* di Coppo' Dusun Bacu-Bacu Lalabata, dan juga selainnya dalam keluarga ahliwaris *Petta Ajalireng*,¹¹ dan sebagainya.

Istilah *Tompa' Bulu'*, sesungguhnya adalah nama kedudukan seorang Raja Tradisional, sebelum diperbaharui dengan nama sekarang ini disebut Tanete Riaja; yakni kehadirannya dikenal dalam perspektif nama pembaharuan, dan secara terbuka beralasan diterima sebagai salah satu wilayah pemekaran perdana di Kabupaten Barru yang menambahkan jumlah Kecamatan, setelah Tanete Rilau sendiri, Soppeng Riaja, Mallusetasi, dan Barru.

Itulah dalam sejarah semenjak memasuki pemerintahan kolonial, maka secara formal di wilayah tradisional Kerajaan Tanete berubah sebagai Distrik atau Swapraja, yakni berubah berdasarkan sistem politik kolonial dipimpin seseorang disebut *Leenvorts* dalam bahasa Belanda artinya Raja Pinjaman, atau dalam bahasa Bugis disebut *Rapang* yang berkedudukan di Pancana dan Lalolang. Dalam kedudukan itu bagi Belanda diberdayakan sebagai kaki tangan yang diberi kewenangan berkuasa terhadap golongan pribumi / *To Sangiang*, sehingga beberapa orang sebagai berikut, mereka dianggap bersekutu dan merupakan Raja Pinjaman; yaitu, *La Rumpang Megga, We' Colliq PujiE, La Sangaji Datu Bakke', We' Tenri Dlle, dan I Pantjai Tana*.

Bagi masyarakat di Tanete, yakni terhadap *To Sangiang* sisa dipercaya sebagai nama leluhur belaka dan dari padanya bukan orang yang sekeluarga Dipertuan Agung atau *Riadeki'* bahasa Bugis, disebabkan bumi dan dirinya telah direlakan tunduk dan terlindungi setelah dinyatakan menyembah

¹¹ Manuskrip Silzilah Raja- Raja Kerajaan Tanete dan Barru (Lontara Panguriseng).

/ Mangngade' bahasa Bugis, dan itu terbukti dengan nama Kerajaan ini sebelum digelar Tanete, terlebih dahulu diberi nama *Agang ni Onjo'* bahasa Makassar, dan dari artinya menunjukkan tanah diinjak, dan juga berarti tunduk menyembah; selain maksudnya apa yang diinjak adalah mencakup buminya, juga sekaligus sumber daya manusianya.

Dengan demikian, di sepanjang wilayah-wilayah Kerajaan Tanete tidak mengenal adanya kepemilikan individu di atas tanah-tanah seperti sekarang ini, kecuali semuanya dalam kepemilikan Raja, termasuk manusia sendiri tanpa kecuali, oleh karena itu tanah bersama dengan manusianya sekaligus dimiliki oleh Raja. Itulah bagi masyarakat *To Sangiang* sejak itu dengan seyakini-yakinnya memegang falsafah politik tradi-sional berkata; *Mauni Polo Pan Polo Panni Narekko' Elo'na Mua Ade'E/Datu'E*; maksudnya; dalam kehidupan ini tidak ada kecualinya kemauan yang mengalahkan Raja/ Adat atau Raja adalah Tuhan Yang Maha Kuasa di Dunia ini.

Dalam Islam sehubungan dengan prinsip di atas, memang seiring dengan pendapat Ibn Taimiyah Hujjatul Islam dalam berpolitik *Al Sulthaanu Dhillul Allah Fiy Al Ardhi* artinya Raja adalah bayangan Allah swt di atas bumi ini.¹²

Sebaliknya, mengenai mitos leluhur bagi etnis *To Nepa* sebagai dipercaya berasal dari */ Messang* adalah seorang perempuan memiliki makna serupa dengan lelaki *La Sangiang* di Tanete. Konon */ Messang* melahirkan keturunan 40 orang banyaknya, semuanya bergulir di kemudian hari sebagai tokoh atau pemuka masyarakat bergelar *Puang-Puang* dalam komunal *Ade' PatappuloE*, mereka semuanya secara tak terkecuali adalah siap memerintah, tetapi sayangnya tidak seorangpun rakyat hendaknya diperintah kecuali dirinya sendiri; sehingga sepanjang mereka berkuasa di negerinya, sepertinya tidak pernah

¹² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. I, Maret 2000) h. 175

berdiri sebelum berhenti sendiri, alias pada waktu itu belum dianggap terjadi adanya politik sama sekali, atau negaranya tidak pernah mendapatkan sertifikasi dari kerajaan lainnya yang menunjukkan telah diakui kerajaannya sebagai negara berdaulat. Sebagaimana gambarannya dalam sebuah riwayat berikut ini;

Ketika suatu saat, *Para Puang-Puang To Nepo*, mereka dahulu diundang Raja Suppa, menyebabkan semuanya pada datang sebanyak 40 orang. Namun mereka tetap juga diterima dan dijamu, tetapi perjamuannya tidak serupa dengan *Puang-Puang* lainnya, karena piring (*penne*-nya) perjamuan yang diperuntukkan bagi setiap tetamu tidak mencukupi dengannya sebanyak itu, kecuali untuknya persiapan jata seorang *Puang*, dengan demikian dijamulah mereka dengan menggunakan dedaunan alakadarnya, sehingga sejak disinilah mereka merasakan direndahkan dan adu'hai saat itu malunya amat sekali, dan mereka kemudian kembali ke Nepo dengan memboyong kekecewaan dan malunya sangat mendalam, sebagai disebut *Masiri'na Temakamaka* bahasa Bugis.

Sekembalinya dari Suppa, mereka bermusyawarah dalam membicarakan perlunya seseorang petinggi politik; yakni seseorang bakal diambil untuk Dipertuan Agung di antara kita bergelar tradisional *Petta* atau *Sulle-datu / Wakil Raja*. Dengan demikian, setelah musyawarah berhasil diperoleh dengan keputusan bersama; bahwa ditunjuk seseorang di antara kita untuk diutus dalam rangka meminta keturunan Raja di Suppa. Walhasil usulan tersebut diterima Raja di Istananya dan Beliau sendiri dengan sukarela menyerahkan anaknya dikirim atau dibawa ke Nepo, dan diberinya nama *La Bongngo'* dalam bahasa Bugis artinya Si Bodoh.

Konon Raja Suppa mempunyai keturunan tidak seorang saja, di antaranya *La Bongngo'* namanya, beliau sendiriannya adalah seorang anak lelaki belum dewasa, belum cerdas atau bodoh, sehingga Baginda tersebut masih perlu dipelihara atau dibesarkan, diajar atau dididik dan dikawinkan. Bagi Masyarakat Nepo dengan sukarelanya sangat setia; *La Bongngo'* bakal seorang calon Dipertuan Agung,

secara formal disambut dengan bergembira ria bersama dengan segala konsekuensinya, seperti mendidik dan mencerdaskannya, membesar-kan dan mengawinkannya.

Keberadaan *Puang-Ta La Bonggo'* dalam masyarakat, sesungguhnya adalah suatu tanggung-jawab besar; resikonya berat sekali, tidak sama beratnya dengan *Petta* lainnya, misalnya terhadap tradisional *Petta Kiru-Kiru* dan *Petta Balusu*.

Oleh sebab itu, dari sinilah mulai kelihatan *La Bonggo'*, sesungguhnya adalah seseorang di antara anak Raja yang terkirim ke daerah; dan bersama dengannya membawa tanggung-jawab besar bagi masyarakat secara berlebihan, dan itu membuat nama sekarang ini Kerajaan Nepo, sesungguhnya namanya itu merupakan perubahan konsonan berasal dari kata *Repo'* bahasa Bugis artinya beban berat atau *tiwi matane'* bahasa Bugisnya. Demikian beberapa hal di Kerajaan Nepo memberikan gambaran berbeda, bukan saja di Kerajaan sekitarnya Kiru-Kiru dan Balusu, juga perbedaannya di Kerajaan Tanete dan Barru..

Mengenai *Etnis To Nepo* berbasis keluarga / *Messangeng*, janganlah kiranya dipandang enteng, karena etnisnya terbilang *Puang-Puang Patappulo'E*, sesungguhnya telah tersebar ke mana-mana, mereka utamanya terbagi di empat Kabupaten dan Kota, yaitu sebagian besar di Kabupaten Barru, dan selainnya sebagian di Sawitto Kabupaten Pinrang, dan sebagian lagi di Bumi *Nene' Mallomo* Kabupaten Sidrap, serta sebagian pula di Pare-pare Bersahaja Kota Kelahiran B. J. Habibi Presiden Republik Indonesia ke 3.

Itulah Kabupaten Barru secara tradisional tidak terkait wilayah bersifat bebas terhadap daerah lainnya, melainkan wilayah administratif yang terikat sebagai penyangga, penyambung dan penambah; yakni salah satu di antara beberapa wilayah dipetakan ke dalam kerukunan tradisional daerah-daerah se *Ajangtapareng*.

Secara khusus, dihubungkan dengan topik pembicaraan di atas, *Etnis To Nepo* dalam sebarangnya di Kabupaten Barru, kelihatannya memanjang dari perbatasan Pare-pare sampai dengan memasuki Desa Madello wilayah perbatasan antara Kecamatan Soppeng Riaja dahulu dan Kecamatan Barru, sehingga dari segi kepanjangan telah menyita perbedaan jarak lebih seperdua panjangnya *Wanua'E* Barru sekarang ini.

Kecamatan Balusu dan Soppeng Riaja berbasis *Wanua'E Kiru-Kiru*, sebagai kecamatan sekarang ini, secara berdua adalah keluarga keturunan *Sub Etnis To Nepo*, setelah dikecualikan keluarga tradisional *Anreguru La Itung* Ajakkang Soppeng Riaja; sebab ia sesungguhnya adalah keluarga etnis berbasis tradisional *Anreguru Lapajung Malaka Kerajaan Soppeng*.

Kesimpulan di atas, semuanya merupakan deskripsi penulis setelah mencermati beberapa pesan orang tua, antara lain berkata: *Pada Issenggi Nenemu Eh Kalaki', Nasaba' Seuwani Wettu, Na'alagamani Tauwe Nenemu, Na Nenena Nawerekk*.¹³

Tentu berdasarkan pesan di atas, kebenarannya telah disaksikan sekarang ini, dicontohkan misalnya penduduk di sepanjang Kabupaten Barru, semuanya terpaksa dikatakan *To Berru* pada hal di dalamnya ter-dapat perbedaan etnis sangat tajam dan jangan hendaknya dipertukarkan antara ketiganya apakah etnisnya *To Tanete Tulen* dan *To Nepo Tulen*. Terkecuali, misalnya bagi Penulis, adalah putra kelahiran Mangkoso Kota Santri dan Serambi Mesir. Ia adalah keluarga bukan kebetulan ditakdirkan memiliki garis keturunan dari etnis ketiga-tiganya di Kabupaten Barru.

Pesan-pesan berikutnya; sehubungan dengan konteks diinginkan menurut topik di atas, berkata:

¹³ Artinya: *Hei Anak-anaku semuanya, ketahuilah nenek moyangmu, karena di kemudian hari suatu masa terjadi pertukaran moyang, nenekmu diambil orang dan kamu diberikan neneknya.*

" De'itu Kiru-kiru Narekko' De'i Balusu, De'toi tu Balusu Narekko' De'i Nepo. Nene'ta ri Olo Mappamulai Pole ri Nepo Inapasi Lao ri Balusu, Inapasi lao ri Kiru-Kiru. Aja' Muengka Salaiwi Kiru-Kiru, Narekko' Engkani Titti Onroi-wi Titti'na Narekko' Engkani Moppang On-roiwi Alekke'na.¹⁴

Dengan demikian, tentunya di sini telah menunjukkan bahwa *Panngadereng* di Kiru-kiru secara senioritas berawal dari Balusu, *Panngadereng* di Balusu secara senioritas berawal dari Nepo. Di samping itu berarti; Nepo melahirkan Balusu, Balusu melahirkan Kiru-kiru, dan jangan sebaliknya. Oleh sebab itu, dari berbagai makna disimpulkan, bahwa antara Nepo, Balusu dan Kiru-Kiru secara bertiga tak dapat dipisahkan di antara satu dengan selainnya, Ketiganya adalah suatu kesatuan sistem tradisional, terbingkai sebagai *Trio in One* dalam bahasa Bugisnya *Dua'i Temasarang Tellu'i Temalaiseng*, yakni secara bertiga tidak mengapa dikawinkan ke dalam persekutuan wilayah bergelar *Tellu Limpo'E* bahasa Bugis.

Pesan - pesan selainnya, bukan kebetulan bertalian sekali dengan di atas; *" Minasa Mabbulo Sibatang, Mallebu Tello' PalewaEngi Tanah AssalamarengngE Berru, Niga Tenggang Balempang Nagaru Wara Iyatona Namangureng, Nigi-nigi Tetta' Salima' Tetta' Pabbingeng Iyatona Natonggang Ware', Narekko' Titti'ni WanuaE Berru Narionroi Titti'na Narekko' Moppangngl Narionro'l Oppanna.¹⁵*

Tentu saja, berdasarkan harapan dan perkiraan bahwa siapakah gerangan sebagai seorang tersirat dirahasiakan menurut gambaran di atas; sesungguhnya yang dimaksud adalah penulis sendiri,

¹⁴ Artinya: Kiru-Kiru tidak bakal ada kalau sekiranya Balusu belum ada, dan Balusu tidak bakal ada kalau sekiranya Nepo belum ada; Nenek Moyang kita dahulu mulanya berasal dari Nepo, kemudian berkembang biak ke Balusu, kemudian keturunannya berkembang lagi ke Kiru-Kiru; " Janganlah kamu tinggalkan Kiru-Kiru, jika keadaannya telah miring, maka tinggallah di pemiringannya; dan jika keadaannya telah tiarap, maka tinggallah di punggungnya.

¹⁵ Artinya : Dengan penuh harapan, bagaikan sebatang bambu, dan sebutir telur membulat, bakal seorang saja yang menegakkan adat/tradisional daerah Barru, sehingga barangsiapa membongkar rumah dapur, maka itulah tertimpa bara api, dan barangsiapa melepaskan tiang penyangga atap, maka itulah tertimpa tiang, jika keadaan di Barru dalam keadaan miring, ikutilah kemiringannya, dan jika keadaannya telah tiarap, ikutilah tiarapannya.

setelah dalam berbagai hasil penelitian yang dicapai selama waktu lebih satu setengah dasawarsa, sehingga baginya tersimpul secara *messianis* (*Wija-Lawo*) yang menunjukkan suatu perspektif kebangkitan sejarah di Kabupaten Barru, dan baginya mengidamkan dalam kebanyakan sejarah di Kabupaten Barru, adalah hendaknya disikapi keterpurukannya, setelah waktu berlalu selama lebih seabad atau istilah *Sipangngu-muruken Tauni Ettana*,¹⁶ sehingga terhadap sejarah selama ini di Kabupaten Barru terkesan masih dalam kekeliruan yang terkunci di bawah peninggalan kolonialisme.

Penulis ditakdirkan bukan kebetulan Putra Bangsawan bersilzilah *Wija Matola Ade' Arung Tompo Bulu Matajang - Datu Tanete Barru*, dan *Wija Pakkatenni Ade'/Paku Alam Kiru-Kiru' / Ajakkang Soppeng Riaja*.¹⁷ Dengan demikian, adalah bagi Penulis tersimpul ikatan berbagai etnis keluarga; *Iyatona Etnis To Tanete, Iyatopa Etnis To Berru, Iyatoni Etnis To Nepa, Iyatopi Etnis To Soppeng*. Jadinya bagi Penulis adalah tergabung garis-garis keturunan bersegi banyak disebut *Masulapa' EppaE* bahasa Bugis; sehingga sebagai dahulu bagi orang-orang tua yang berwasiat dengan gambaran keluarga seperti ini, berkata; *Mabbulo Sibatang, Mallebu Tello, sibawa Matulu' Tellu' Temalara*,¹⁸ kini faktanya telah terkait sekali dalam perspektif di atas.

Terakhir, sebagai masalah penting untuk dipertanyakan; dimana hendaknya dijadikan Ibu Kota Peme-rintahan, kalau sekiranya di atas telah berpotensi sebagai keinginan antara masyarakat dan pemerintah, maka terlebih dahulu penulis mengawalnya dengan kesimpulan yang memilih Ibu-kota di Mangkoso Kota Santri; selain kotanya dikenal secara nasional dengan Pendidikan Madrasah dan

¹⁶ Artinya: *kelamaan waktu sepanjang umur manusia, yakni satu abad atau 100 tahun.*

¹⁷ Artinya : *Keturunan Pemilik Tahta Kerajaan Tompo Bulu Matajang Tanete-Barru dan keturunan ahliwaris Paku Alam Kiru-Kiru dan Ajakkang Soppeng Riaja.*

¹⁸ Artinya : *Keturunan bersebatang bambu, berbundar telur, dan bertali temali tak terpisahkan.*

Pesantrennya, juga dipersiapkan sekaligus Kota Beradab dan Beradat, serta Kota Administratif kedua sesudah Ibu Kota Kabupaten Barru.

D. Penutup

Ringkasan sebagai diambil penutup ulasan dalam tulisan ini “ *Barru Berpotensi Dimekarkan Dengan Pembentukan Kabupaten Nepo* ”, adalah dikemukakan secara deskriptif sebagai berikut:

Kabupaten Barru dalam formalitasnya sekarang ini, bukannya didirikan sebagai saja berasal dari satu wilayah peninggalan kultural, melainkan beberapa wilayah terbentuk berdasarkan sistem kebijakan politik kolonial di daerah bergelar *Onderafdeling* di Sumpang Minanga'E; yakni secara administratif, kebesarannya setingkat dengan kecamatan dewasa ini; sementara beberapa wilayah sebagai bawahan bernegara disebut Distrik atau Swapraja terbentuk di atas wilayah bekas Kerajaan-Kerajaan; kedudukannya sekarang sederajat dengan istilah Desa atau *Wanua* bahasa Bugis.

Sistem Konfederasi atau *Passiagingeng* di Kabupaten Barru, sepanjang jauh merupakan sistem tradisional daerah sejak pemerintahan kolonial, sebagai gambarannya disebutkan terpadu, berkata: “ *Datu ri Tanete, Petta ri Berru dan Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja*”. Itulah di Kabupaten Barru sebelum berkiprah dengan kelembagaan politik tradisional terlebih dahulu dipertanyakan mengapa *Datu* di Tanete, mengapa *Petta* di Barru dan Mallusetasi, mengapa *Arung* di Soppeng Riaja; sehingga semuanya sebelum terjawab tuntas, lebih terdahulu tersimpul bahwa di Kabupaten Barru berpotensi dimekarkan setelah dicermati secara saksama dengan pendekatan sejarah, etnologi, sosiologi, dan antropologi; representatifnya telah secara gamblang dianalisa sebagai dalam pembahasan sub B dan C.

Sehubungan dengan penelitian ini, secara positif dinilai bertujuan untuk perkembangan ilmu penge-tahuan dan pembangunan Indonesia, maka di Daerah Barru berdasarkan fenomennya menarik diberi wacana pemekaran dengan terbentuknya Kabupaten Nepo; dan setelah diteliti berdasarkan

fenomenya bahwa dengannya telah diyakini bukan suatu kemustahilan; selain tidak hanya boleh ditanggapi secara instan dan insidental, juga dalam wacananya tetap dipertimbangkan, kecuali jika segalanya telah dianggap siap siaga dengan studi kelayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- *Alquran Al- Karim*
- Andaya, Y. Leonardo. 2004. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Abad 17. Innawa, Makassar*
- Mubarak, Jaih. Maret 2000. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I. Bandung.
- Mattulada, H. A. 1995. *Latoa, Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- Poelinggomang, Edward. L. 2004. *Perubahan Politik & Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Penerbit Ombak Jakarta.
- Walinono, Hasan. 1979. *Tanete Suatu Studi Sosiologi Politik*. Disertasi. Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Rahim, Abdul. 2005. *Sistem Pemerintahan Tradisional Bekas Kerajaan Barru Suatu Tinjauan Antro-pologi Politik*. Tesis PPs Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Rahman, Nurhayati, 2008. *Retna Kencana Colliq PujiE Arung Pancana Toa 1812-1876 Intelektual Peng-gerak Zaman*. Lagaligo Press, Makassar.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. PT. Gravindo Press. Cet. II, Jakarta.
- Zaenong, Andi M. Anwar. 2009. *Sistem Politik Tradisional di Soppeng Riaja Bekas Kerajaan Kiru-Kiru dan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan Suatu Studi Antropologi Politik*. Tesis PPs Universitas Hasanuddin Makassar
-, 2010. *Islam Dan Sistem Politik Tradisional Di Mallusetasi Bekas Kerajaan Nepo*. Laporan Hasil Penelitian P3M STAIN Pare-Pare. Tidak Dipublikasikan.
-, 2008. " *Silzilah Raja-Raja Se Wilayah Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan* ". Direduksi dari " *Lontara Panguriseng* " sebagai telah dipindahkan oleh A. Muh. Ridha Mansur Pekerjaan Depsos Kabupaten Soppeng.

Mangkoso, 10 Februari 2016

Daftar Riwayat Hidup: Penulis lahir di Mangkoso, Selasa 19 April 1957, Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Muda (BA) pada Universitas Islam Ad-Dariyyah DDI Pare-pare (1978) Pendidikan Sarjana Lengkap (Drs) pada IAIN Alauddin Ujungpandang (1984), Pendidikan Magister (S2/MA) pada Perguruan Tinggi yang sama (1993), Pendidikan Magister kedua kalinya Prodi Antropologi (S2/M.Si), pada Universitas Hasanuddin Makassar (2009). Hingga kini, ia adalah Dosen Lektor Kepala IV b pada STAIN Pare-pare Sulawesi-Selatan. Di samping sebagai Guru Pembina Pondok Pesantren Ambo Dalle DDI Mangkoso Barru.

Mangkoso, 10 Februari 2016

**BARRU BERPOTENSI DIMEKARKAN DENGAN
PEMBENTUKAN KABUPATEN NEPO**

Oleh:
Drs. H. ANDI M. ANWAR ZAENONG, M.A., M.Si
Dosen STAIN Pare-Pare
Sul-Sel

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Senin, 08 Februari 2016